



## Peranan Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Kemiskinan di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

Elda Nengsri<sup>1\*</sup>, Jamurin<sup>2</sup>, Indra Rahmat<sup>3</sup>

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas PGRI Sumatera Barat

[\\*eldanengsri18@gmail.com](mailto:eldanengsri18@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received February 20<sup>th</sup>, 2023

Revised March 11<sup>th</sup>, 2023

Accepted June 27<sup>th</sup>, 2023

#### Keywords:

Nagari

Kemiskinan

Sijunjung

### ABSTRACT

*This study aims to elucidate the determinants of impoverished conditions and analyze the proactive role of the Nagari Government in mitigating destitution within Nagari Sisawah, situated in the Sumpur Kudus District of Sijunjung Regency. Employing a qualitative approach with descriptive techniques, this research centers on key participants including Nagari leaders, officials, and the local community. The study's findings reveal that the origins of poverty within Nagari Sisawah encompass several factors, including insufficient economic returns from rubber cultivation for sustaining families, the repercussions of the Covid-19 pandemic, and constrained employment prospects due to limited educational attainment. The Nagari government has made various efforts to overcome poverty, namely providing socialization and information on economic activities to the community, assisting the community in making proposals to obtain superior seeds and providing assistance to the community through various programs such as PKH and Direct Funding for the community.*

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).*



#### Corresponding Author:

Elda Nengsri

Universitas PGRI Sumatera Barat

[eldanengsri18@gmail.com](mailto:eldanengsri18@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sistem pemeritahan Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat keunikan dimana wilayah setingkat desa dikenal dengan nama Nagari. Pemerintahan Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai kewenangannya. Selain itu, Nagari harus menyepakati rencana pembangunan untuk enam tahun ke depan yang disesuaikan dengan visi dan misi wali nagari terpilih dan ditetapkan dengan peraturan nagari. Walaupun pada prakteknya terdapat berbagai permasalahan seperti transparansi penggunaan dana desa di Nagari (Miranda, 2019).

Permasalahan yang terdapat di nagari salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lainnya. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak (BPS, 2018). Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan dan papan. Pendapatan yang rendah juga berdampak pada kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Salah satu nagari yang masyarakatnya memiliki pendapatan yang rendah adalah Kenagarian Sisawah di Kecamatan Sumpur Kudus. Nagari Sisawah terdiri dari 3.608 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 992 KK dan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 320 KK. Masyarakat nagari ini rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani karet. Rendahnya produktivitas dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan tingginya pengangguran. Hal ini mengakibatkan masyarakat hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah, seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam implementasinya, pemanfaatan dana PKH di beberapa Nagari di Sumatera Barat juga mengalami permasalahan. Misalnya di Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, penerima PKH memanfaatkan dana tidak semestinya, yang utamanya harus digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan pendamping yang mengakibatkan dana tidak tepat sasaran (Parni, 2020). Selain itu, kebijakan dari pusat ke daerah yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) telah mengakibatkan lambatnya implementasi PKH di berbagai Nagari (Oktaviani, 2018). Permasalahan kemiskinan di Nagari Sisawah tentunya mempunyai permasalahan yang berbeda dengan nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur yang buruk, seperti: jalan aspal dan listrik yang belum merata telah memperburuk tingkat kemiskinan di Nagari ini. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: bagaimana gambaran kemiskinan di nagari Sisawah? Apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk memberantas kemiskinan di Nagari ini?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian ini bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu (Afrizal, 2014). Peneliti berharap dapat menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis dan lisan dan perilaku orang yang diamati. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana peranan pemerintah nagari dalam mengatasi kemiskinan di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan observasi, peneliti melihat secara langsung lokasi penelitian agar dapat mengungkapkan fakta yang terjadi. Sementara wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu: masyarakat, wali nagari, bendahara dan sekretaris nagari, kepala jorong dan Badan Permusyawaratan Nagari. Dokumentasi dilakukan dengan mengecek beberapa data terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan dari tanggal 19 Mei hingga 11 Juni 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Sisawah terdiri dari tujuh jorong, yaitu: Koto, Koto Baru, Subalin, Sungai Tampang, Simawik, Rumbai dan Kabun. Total jumlah penduduk di Nagari ini adalah: 3.608 (Profil Nagari Sisawah, 2021). Sementara itu, mata pencaharian yang ada di nagari Sisawah bervariasi sesuai dengan kondisi tempat tinggal masyarakat, namun mayoritas pekerjaannya adalah petani. Gambaran lebih jelas mengenai mata pencaharian penduduk nagari Sisawah terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 1**  
**Pekerjaan Penduduk Masyarakat Nagari Sisawah Tahun 2021**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	2800 Orang	77,6%
2.	Pegawai Negeri Sipil	30 Orang	0,8%
3.	Swasta	80 Orang	2,2%
4.	Pedagang/Pengusaha	150 Orang	4,2%
5.	TNI/POLRI	-Orang	0%
6.	Pensiunan	23 Orang	0,6%
7.	Aparat Pemerintah Nagari	26 Orang	0,7%

8.	Buruh Harian Lepas	105 Orang	2,9%
9.	Mengurus Rumah Tangga	98 Orang	2,7%
10.	Tukang Bangunan	24 Orang	0,7%
11.	Tukang Kebun	33 Orang	0,9%
12.	Tidak/Belum Bekerja	239 Orang	6,6%
		3.608 Orang	100%

*Sumber : Profil Nagari Sisawah, 2021*

Sementara itu, jumlah keluarga pra-sejahtera di Nagari Sisawah adalah 320 KK. Keluarga pra-sejahtera dapat dikatakan sebagai keluarga miskin dimana mereka tidak memenuhi salah satu indikator kebutuhan dasar keluarga. Anggota keluarga yang makan dua kali dalam sehari, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana (KB) pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi dan semua anak umur 7-15 tahun bersekolah.

**Tabel. 2**  
**Jumlah Tingkat Kesejahteraan Keluarga 2021**

No	Tingkat Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Keluarga Pra sejahtera	320 KK
2.	Keluarga Sejahtera I	639 KK
3.	Keluarga Sejahtera II	34 KK
4.	Keluarga Sejahtera III	5 KK
5.	Keluarga Sejahtera III Keatas	1 KK
	Jumlah Kepala Keluarga	992 KK

*Sumber : Profil Nagari Sisawah, 2021*



Gambar 1. Kantor Wali Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat di Nagari Sisawah memiliki mata pencaharian sebagai petani karet. Biasanya pendapatan mereka adalah Rp. 300.000/bulan. Menurut pengakuan salah satu warga, zaman sekarang ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangatlah susah karena semakin besarnya kebutuhan keluarga baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya biaya untuk membeli bahan masakan seperti beras, minyak goreng dan cabe. Mereka merasa tidak mencukupi dari penghasilan tersebut. Petani karet memperoleh hasil kerja yang tidak menentu apalagi harga karet yang tidak tetap dan faktor cuaca yang tidak mendukung. Harga karet di Nagari Sisawah pada bulan Juli tahun 2022 adalah Rp. 9.000/kilo.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Nagari Sisawah adalah pandemi Covid-19. Pandemi telah berpengaruh terhadap melemahnya daya beli masyarakat secara luas, hal ini disebabkan karena masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaannya. Walaupun pandemi bersifat global, tapi masyarakat Nagari Sisawah yang sebelumnya sudah berada di titik kemiskinan, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah telah mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan diri. Dampak beruntun dari rendahnya pendidikan adalah sempitnya peluang kerja. Banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya di Nagari Sisawah, mereka memilih untuk bekerja daripada sekolah. Hal ini menjadi suatu dilema karena berbagai faktor ini saling berhubungan.

Sementara itu, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah sebagai buruh harian lepas seperti mengangkat kayu untuk membuat rumah dan mengangkat pasir. Walaupun mereka mengakui bahwa pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang ingin mereka tekuni, namun mereka merasa tidak ada pilihan. Anak-anak tersebut mendapatkan gaji yang dihitung tiap hari atau tiap minggu yang kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis pekerjaan ini dilakukan hanya ketika ada orang yang membutuhkan tenaga kerja mereka, namun apabila tidak ada pekerjaan, mereka akan menganggur di rumah.

Pilihan pekerjaan lainnya adalah di sektor pertanian. Namun hasil yang tidak menentu menyebabkan kemiskinan di Nagari Sisawah. Faktor yang lebih bersifat subjektif yang berasal dari dalam diri adalah kemalasan dalam bekerja. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang responden yang menyatakan bahwa dia lebih suka menerima bantuan berupa uang dari keluarga daripada mencari uang sendiri melalui bertani karet. Rasa malas tentunya dapat mengakibatkan terhalangnya kemajuan dalam masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan sosialisasi dan informasi kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Restu Syamsepta sebagai wali nagari Sisawah menyatakan bahwa Pemerintah Nagari mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan memanfaatkan lahan baru yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, Nagari juga mendampingi kelompok tani dalam merancang proposal untuk mendapatkan bibit-bibit pertanian yang unggul yang berasal dari bantuan pemerintah. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Nagari Sisawah juga mengadakan pelatihan-pelatihan dan membuat pupuk organik bersama dengan kelompok tani di setiap jorong.



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Wali Nagari Sisawah

Pemerintah Nagari juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui beberapa program, yaitu: Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung adalah: kegiatan ekonomi masyarakat, pengaruh Covid-19, tingkat pendidikan masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan dan etos kerja. Pemerintah Nagari sudah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi kemiskinan, yaitu memberikan sosialisasi dan informasi kegiatan perekonomian kepada masyarakat, mendampingi masyarakat dalam pembuatan proposal untuk mendapatkan bibit-bibit yang unggul dan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti PKH, Sembako, dan BLT.

Pemerintah nagari Sisawah sudah menjalankan beberapa prinsip pemerintahan yang terdiri dari: prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka pemerintah nagari Sisawah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.

## REFERENSI

Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Miranda, P., & Akmal, A. (2019). Transparansi Penggunaan Dana Desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(4), 412-418. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.192>

Milakarma, P., & Montessori, M. (2018). Pemerintah Nagari dan Upaya Memberdayakan Masyarakat. *Journal of Civic Education*, 1(2), 158–167.

Oktaviani, R., & Fatmariza, F. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 1(2), 123-132. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.208>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Bupati Sijunjung. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyerahan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga. Sumatera Barat.

Parni, M., & Nurman, N. (2020). Pemanfaatan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Kanagarian Alahan Panjang. *Journal of Civic Education*, 1(4), 309-316. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.305>

Presiden Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia.

Elda Nengsri, Jamurin, Indra Rahmat. *Peranan Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Kemiskinan di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*

Wali Nagari Sisawah. 2020. Peraturan Nagari Sisawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sisawah Tahun 2020 s/d 2025.Sijunjung.